

**PERAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
UKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM SENTRA TAS DI DESA LORAM
KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**

OLEH : DIAN RATIKA YUNIASARI
Email : dianratika21@gmail.com
Pembimbing : Drs. Ahmad Taufiq, M.Si

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telp/Fax. (024) 7465405**

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu roda penggerak kegiatan perekonomian di Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebanyak 60,34 persen pada 2017. Saat ini dibutuhkan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM agar usaha tersebut mampu tetap eksis dan bertahan dalam arus perekonomian. Sektor industri menjadi tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 81,09 persen. Salah satu penyangga utama perekonomian adalah sektor UMKM dimana di Kabupaten Kudus terdapat banyak UMKM dari berbagai sektor seperti bordir, batik, tas, pisau dan makanan. Desa Loram Kulon sebagai salah satu sentra pembuatan tas juga membutuhkan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, salah satu bagian pemerintah yang mempunyai peran dalam pemberdayaan UMKM adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha tas di Desa Loram Kulon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan di Desa Loram Kulon sebagai sentra pembuatan tas belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena dari dinas sendiri belum ada agenda khusus untuk desa tersebut. Selain itu salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemberdayaan adalah tidak adanya organisasi ataupun paguyuban yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha tas dikarenakan dari masyarakat sendiri juga sulit untuk diajak berorganisasi sehingga pemerintah juga mengalami kesulitan untuk menyalurkan bantuan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan, UMKM

THE ROLE OF LABOR, INDUSTRY, COOPERATIVE, AND SMEs DEPARTMENT IN UMKM EMPOWERMENT OF SENTRA BAG IN THE VILLAGE OF WEST LORAM OF JATI SUB-DISTRICT OF KUDUS

Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the prime powers of economic activity in Indonesia. The contribution of the MSME sector to Gross Domestic Product increased from 57.84 percent to 60.34 percent in 2017. By seeing the magnitude of the influence of SMEs, the role of government in the empowerment of SMEs is necessary so that business can still exist and survive in the economic flow. Kudus is the smallest district in Central Java, but the industry in the district is also growing quite rapidly. The industrial sector became the main pillar of the economy of Kudus district with a contribution of 81.09 percent. One of the main buffers of the economy is the sector of MSME where in Kudus there are many SMEs from various sectors such as border, batik, bag, knife and food. Loram Kulon Village as one of the centers of bags also requires the role of government in the empowerment of SMEs. One part of government that has a role in the empowerment of SMEs is the Department of Labor, Industry, Cooperatives and SMEs.

This study aims to determine the role of the Department of Labor, Industry, Cooperatives and SMEs in the empowerment of bag business in West Loram Village. In addition, this study also aims to determine the supporting factors and inhibiting factors in the effort of empowerment. This research uses descriptive qualitative method with observation, interview and documentation techniques.

The results of this study indicate that the role of the Department of Labor, Industry, Cooperatives and SMEs in the empowerment of bag business in West Loram Village as a bag-making center has not run optimally. This happens because from the official itself there has been no specific agenda for the village. In addition, one of the factors that become obstacles in empowerment efforts is the absence of organizations or associations that become a container for business players. It is because the bag from the community itself is also difficult to be invited to organize so that the government also has difficulty to channel assistance.

Keywords: Role of Government, Empowerment, MSME

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu sektor usaha yang menjadi tiang penyangga kegiatan perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan pada saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 sektor usaha ini mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sektor usaha ini mampu dimiliki seluruh masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Selain itu keunggulan lain yang dimiliki oleh sektor tersebut adalah mampu melibatkan banyak tenaga kerja dikarenakan bahwa proses produksi dalam sektor ini masih dilakukan secara manual. Dengan banyaknya orang yang terlibat dalam usaha kecil tersebut, berarti sejalan dengan indikator utama pemberdayaan, yaitu melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan.

Disisi lain, kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap produk domestik bruto (PDB) ini semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir.¹

Sektor UKM, yang bergerak dalam berbagai horison kegiatan ekonomi, terutama bidang manufaktur, sudah lama dinilai sebagai sektor terpenting dalam mengikis masalah gawat yang dihadapi Indonesia, yakni pengangguran dan setengah pengangguran. Karena itu, pengembangan sektor yang tersebar di seluruh negeri, khususnya di pedesaan, dinilai sangat baik dan strategis tidak saja untuk memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, tetapi sekaligus pula mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan di Indonesia.²

Secara geografis, letak Kabupaten Kudus cukup strategis, karena berada di jalur perlintasan ekonomi antar provinsi sehingga menjadikan kota ini sebagai sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi. Kota Kudus terkenal sebagai industri rokok atau kretek terbesar di Indonesia. Industri yang telah dijalani berpuluh tahun tersebut menawarkan banyak sekali manfaat, sebagai contoh adalah lapangan pekerjaan yang terbuka untuk para penduduk di Kabupaten Kudus. Namun dapat dilihat bahwa saat ini sentra UMKM di

¹ Di akses di <http://www.kememperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik> pada tanggal 20 Mei 2017

² Haryono Suyono, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat: Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, Hal. 238-239.

Kabupaten Kudus juga terus berkembang beriringan dan tidak kalah dengan industri rokok. Pergerakan kemajuan UMKM ini mulai dari berbagai produk seperti bordir, batik, tas, pisau, gebyok dan makanan minuman seperti jenang hingga kopi tapak muria.

Dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Kudus, Desa Loram yang dibagi mejadi Loram Wetan dan Loram Kulon ini juga sangat dikenal. Pasalnya, dua desa ini merupakan sentra usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berbagai *home industry* berada disini. Mulai dari usaha pembuatan makanan, sabuk, tas, konveksi hingga pengumpulan barang rosok. Kebanyakan warga kedua desa ini memang lebih senang berwiraswasta daripada menjadi buruh di pabrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, di Desa Loram Wetan terdapat sekitar 170 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang. Sementara di Desa Loram Kulon tak kurang 218 pelaku UMKM yang terdaftar pada dinas tersebut. Berbagai produk hasil dari UMKM yang ada di kedua desa tersebut mempunyai peluang yang sangat bagus untuk terus dikembangkan. Apalagi rata-rata sudah memiliki pasar dan pelanggan hingga level nasional.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat seberapa besar peran pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberdayaan UMKM di desa tersebut. Sehingga peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul "*Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Tas di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*".

2. Landasan Teori

2.1 Peran Birokrasi

Fungsi pokok birokrasi dalam negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat/ masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu negara. Untuk melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok yakni³:

1. Memberikan pelayanan umum (*service*) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk;

³ Budi Setiyono, 2012, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administratif*, Bandung: Ujungberung, Hal. 20

2. Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan, dan;
3. Menyelenggarakan pembangunan (*development*) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, dan telekomunikasi, perdagangan.

2.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya. Menurut Rappaport pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Menurut Ismawan menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

1. pengembangan sumber daya manusia;
2. pengembangan kelembagaan kelompok;
3. pemupukan modal masyarakat (swasta);
4. pengembangan usaha produktif; dan
5. penyediaan informasi tepat guna.

Sedangkan menurut Wrihantolo, pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu :

1. Tahap penyadaran;
2. Tahap pengkapasitasan; dan
3. Tahap ketiga pemberian daya atau *empowerment*.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

| No. | Usaha | Kriteria | |
|-----|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Aset | Omset |
| 1. | Usaha Mikro | Maks. 50 Juta | Maks. 300 Juta |
| 2. | Usaha Kecil | >50 Juta – 500 Juta | >300 Juta – 2,5 Miliar |
| 3 | Usaha Menengah | >500 Juta – 10 Miliar | >2,5 Miliar – 50 Miliar |

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Tenaga Kerja,

Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Sedangkan situs penelitian adalah Desa Loram Kulon. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap Kabid Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Kasi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan UKM; Kasi Pengembangan SDM dan Teknologi UKM; Kepala Desa Loram Kulon; Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan masyarakat Desa Loram Kulon yang memiliki usaha pembuatan tas. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. Temuan dan Hasil Penelitian

4.1 Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Ada tiga tahap dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran

Dalam tahap penyadaran, masyarakat diberikan pengertian dan pemahaman agar mempunyai rasa kesadaran dan juga motivasi bahwa mereka harus berkembang. Kesadaran dan keinginan untuk berubah merupakan langkah penting yang harus dilakukan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pada umumnya di Desa Loram Kulon ini masyarakatnya belum memiliki kesadaran dalam berorganisasi. Padahal berorganisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan masyarakat.

Tahap penyadaran ini masih dibutuhkan bagi para pelaku usaha tas yang berada di Desa Loram Kulon tersebut. Pasalnya kesadaran masyarakat untuk mendirikan koperasi ini masih sangat rendah, padahal keberadaan koperasi ini nantinya juga akan membantu para pelaku usaha itu sendiri dalam menjalankan usahanya karena dapat menunjang keberlangsungan kegiatan usaha produksi tas tersebut.

2. Tahap Pengkapasitasan

Dalam tahap pengkapasitasan ini masyarakat sebagai penerima bantuan diharapkan untuk mempunyai kemampuan agar dapat mengelola daya atau kuasa yang diberikan dalam artian masyarakat diberikan kemampuan baik kemampuan organisasi maupun teknis karena dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan individu.

Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam tahap pengkapasitasan ini berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat pelaku usaha, hal ini dengan tujuan meningkatkan kemampuan bagi para pelaku usaha tersebut. Pelatihan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas terkait diadakan setiap tahun tergantung dengan anggaran dan juga kebutuhan.

Dalam tahap pengkapasitasan terkait dengan pemberdayaan UMKM sentra tas di Desa Loram Kulon dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus sudah mengadakan pelatihan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Pelatihan yang dilaksanakan setiap tahunnya ini berbeda-beda kegiatannya, seperti pelatihan pemasaran online dan pelatihan desain produk tas. Selain itu masyarakat juga mendapatkan pelatihan dari Provinsi Jawa Tengah berupa pemberian motivasi kepada pelaku usaha. Pelatihan tersebut diberikan agar masyarakat mempunyai kemampuan dalam mengelola usahanya agar kedepannya usaha mereka terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman.

3. Tahap Pemberian Daya

Tahap yang terakhir yaitu tahap pemberian daya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tahap ini, masyarakat diberikan daya atau peluang untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pada tahap ini Dinas memberikan bantuan permodalan berupa Kredit Usaha Produktif (KUP) dimana KUP ini merupakan program yang dicanangkan dari Bupati Kudus. KUP merupakan kredit usaha bagi usaha mikro yang memiliki usaha produktif dengan skema penjaminan yang selanjutnya disebut Kartu UKM KUP. Untuk pengajuan kredit sendiri tidak menggunakan agunan dimana untuk maksimum kredit sesuai dengan kriteria mulai dari maksimal Rp. 5 juta, Rp. 10 juta, Rp. 15 juta, dan Rp. 20 juta.

4.2 Strategi Dinas dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Tas di Desa Loram Kulon

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus tercapai, maka dari itu dibutuhkan strategi tertentu agar tujuan tersebut dapat tercapai dan berhasil. Dalam hal ini strategi dapat berarti cara ataupun teknik yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Menurut Ismawan menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam segala aspek. Mengingat betapa pentingnya peran manusia dalam segala aspek kehidupan maka diperlukan juga upaya-upaya agar kemampuan masyarakat itu dapat meningkat dengan tujuan bisa bekerja secara efektif dan efisien di segala aspek kehidupan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pengembangan sumber daya manusia ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan bagi para pelaku UMKM tersebut. Pelatihan yang dilakukan dari dinas tersebut bermacam-macam jenisnya seperti pelatihan pemasaran online, pelatihan pembuatan produk dari bahan kulit dan pelatihan desain produk tas.

Untuk masyarakat Desa Loram Kulon khususnya yang mempunyai usaha pembuatan tas sendiri tidak banyak yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas tersebut. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor seperti tidak tahunya masyarakat terhadap pelatihan yang diadakan oleh dinas tersebut ataupun masyarakat yang sudah tahu adanya pelatihan tapi enggan untuk ikut. Padahal dengan mengikuti pelatihan itu bisa mengembangkan usaha mereka dengan inovasi-inovasi produk tas yang baru.

2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa di Desa Loram Kulon ini tidak terdapat koperasi, organisasi ataupun paguyuban yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha tas. Tidak adanya koperasi ataupun lembaga yang mewadahi pelaku usaha tas tentunya akan mempersulit dinas dalam memberikan bantuan, pasalnya dahulu setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan maka peserta pelatihan akan mendapatkan bantuan alat, misalnya jika mengikuti pelatihan menjahit akan mendapat bantuan mesin jahit, tapi sekarang sejak dikeluarkannya peraturan tersebut pemerintah daerah tidak bisa memberikan bantuan apapun.

Disisi lain, keberadaan koperasi ini dianggap cukup penting bagi keberlangsungan kegiatan produksi para pelaku usaha tas, karena dengan adanya koperasi ini akan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan modal ataupun bahan baku.

3. Pemupukan Modal Masyarakat

Mengembangkan sebuah usaha yang ada di desa itu memerlukan dukungan baik moril maupun materiil. Selain dibutuhkannya keaktifan dari masyarakat itu sendiri, juga dibutuhkan modal bagi pengembangannya. Modal tersebut nantinya akan dapat digunakan bagi pengembangan usaha agar kegiatan usaha bisa berkembang dan lebih banyak memproduksi tas. Pemupukan modal masyarakat ini bisa berasal dari pihak swasta ataupun dari pemerintah.

Untuk Desa Loram Kulon sendiri tidak bekerjasama ataupun mendapat bantuan dari pihak swasta. Hal ini seperti apa yang telah dijelaskan pada strategi pemberdayaan melalui pengembangan kelembagaan kelompok bahwa di Desa Loram Kulon itu tidak ada koperasi ataupun kelompok usaha. Padahal dengan adanya koperasi ataupun kelompok itu nantinya akan mempermudah pelaku usaha dalam pengembangan usaha mereka. Disisi lain pemerintah juga tidak bisa memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada pelaku usaha hal ini juga disebabkan oleh tidak adanya koperasi ataupun lembaga yang berbadan hukum. Namun dalam hal permodalan, pemerintah juga membantu tapi hanya sebatas fasilitasi permodalan seperti sosialisasi dengan perbankan, KUR, Mitra 25 dan juga Kredit Usaha Produktif (KUP).

4. Pengembangan Usaha Produktif

Hal ini dapat dikaitkan dengan keikutsertaan masyarakat pelaku usaha dalam kegiatan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti terdapat temuan yang menunjukkan perbedaan antara masyarakat yang mengikuti pelatihan dan masyarakat yang tidak mengikuti pelatihan. Dimana masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan itu disamping ia memproduksi tas punggung biasa, ia juga memproduksi berbagai macam tas dengan inovasi-inovasi baru. Tas yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut bermacam-macam jenisnya, ada tas yang dikombinasikan dengan kulit, tas yang dibuat dengan tambahan bordir dan ada juga tas punggung untuk wanita yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi menarik. Tentunya pelaku usaha ini mendapatkan inovasi-inovasi dalam pembuatan tas setelah mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh dinas. Untuk harga tas

dengan model-model yang beraneka ragam tersebut juga mempunyai nilai jual yang tinggi, dimana satu tas itu kisaran harga Rp 150.000.,

Hal ini tentu saja berbeda dengan masyarakat yang tidak mengikuti pelatihan dari dinas, dimana tas yang mereka produksi itu hanya sebatas dengan tas punggung biasa dan juga tas untuk anak-anak dengan harga jual Rp 150.000 s/d Rp 200.000 per dosin. Hal ini tentunya berbeda jauh dengan harga jual tas yang mempunyai inovasi-inovasi lain. Namun bagi para pelaku usaha yang membuat berbagai macam inovasi tas tadi untuk pembuatan tas cantik tersebut memang tidak memproduksi banyak tas, mereka hanya memproduksi beberapa saja dan untuk penjualan mereka juga hanya memasang tas itu di rumahnya, sehingga pembeli hanya berkisar antara masyarakat sekitar dan juga orang-orang terdekat.

Peran pemerintah yang lain dalam pengembangan usaha produktif itu dengan mengikutkan pelaku UMKM dalam kegiatan expo ataupun pameran yang ada, baik pameran yang dilaksanakan di dalam provinsi maupun diluar provinsi.

5. Penyediaan Informasi Tepat Guna

Penyediaan informasi tepat guna artinya bagaimana mengenalkan potensi Desa Loram Kulon khususnya keunggulannya dalam pembuatan tas. Seperti apa yang sudah dijelaskan pada sub bab kelembagaan kelompok bahwa di Desa Loram Kulon ini sendiri tidak terdapat suatu kelompok usaha atau paguyuban yang menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya pembuatan tas. Dengan tidak adanya kelompok pembuatan tas ini tentunya akan mempersulit bagi para pelaku untuk memperkenalkan produk-produk yang mereka buat, karena dalam pemasaran tas mereka hanya sebatas menjual dengan cara mengirim barang yang mereka produksi kepada distributor tas di kota-kota lain. Padahal jika ada wadah bagi pelaku usaha tersebut tentunya akan mempermudah akses informasi terkait dengan usaha-usaha pembuatan tas, baik seperti wadah untuk pemasaran tas ataupun untuk menarik minat masyarakat agar mau membeli produk-produk tas dari Desa Loram Kulon itu sendiri.

4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

Keberadaan faktor pendukung ini dapat dijadikan senjata bagi pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMKM sentra tas yang ada di Desa Loram Kulon. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat temuan bahwa hal yang menjadi faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan UMKM sentra tas yaitu :

1. Jumlah Pelaku Usaha Tas

Banyaknya jumlah pelaku usaha pembuatan tas yang ada di Desa Loram Kulon ini menjadi keuntungan dalam upaya pemberdayaan. Saat mengunjungi desa ini sekilas tidak ada perbedaan dengan desa-desa lain. Namun perbedaan mencolok yang dapat kita lihat di Desa Loram Kulon ini adalah kebanyakan setiap rumah memproduksi tas. Banyaknya jumlah pelaku usaha tas yang ada di desa tersebut bisa menjadikan peluang bagi pemerintah dalam upaya pemberdayaan, hal ini dikarenakan mudahnya cakupan pemerintah dalam upaya pemberdayaan dikarenakan pelaku usaha tas ini sudah terpusat pada satu desa.

2. Lokasi yang Strategis

Lokasi dari Desa Loram Kulon sendiri ini dapat dikatakan cukup strategis. Jarak dari Desa Loram Kulon ke pusat kota hanya sekitar 5 km, dengan letak yang strategis tentunya juga akan mempermudah bagi upaya pemberdayaan dikarenakan akses untuk menuju desa tersebut juga mudah dan infrastruktur menuju Desa Loram Kulon juga cukup bagus.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ini bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha pemberdayaan UMKM sentra tas. Berikut ini adalah beberapa faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan UMKM sentra tas di Desa Loram Kulon :

1. Kesulitan dalam mencari pegawai
2. Keterbatasan modal
3. Tidak adanya kelompok usaha atau paguyuban

5. Simpulan

Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM sentra tas di Desa Loram Kulon belum berjalan secara signifikan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan temuan bahwa peran dinas terhadap pemberdayaan di desa tersebut tidak terfokuskan hanya pada desa tersebut atau dapat dikatakan belum ada

agenda khusus bagi Desa Loram Kulon. Belum signifikannya pemberdayaan di desa tersebut dapat dilihat berdasarkan lima program strategi pemberdayaan menurut Ismawan. Lima program strategi tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia; pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif dan penyediaan informasi tepat guna.

Kurang signifikannya peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM sentra tas di Desa Loram Kulon juga disebabkan oleh tidak adanya kelompok organisasi ataupun koperasi yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha tas di Desa Loram Kulon tersebut, karena dengan adanya koperasi pastinya akan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan baik bantuan permodalan maupun bantuan sarana dan prasarana bagi para pelaku usaha tas agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Basri, Faisal H. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ArRuzz Media.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moeleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- ND, Mukti Fajar. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiyono, Budi. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administratif*. Bandung: Ujungberung.
- Sjaifudin, Hetifah. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akgita
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:

Alfabeta.

Sunyoto, Usman. 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyono, Haryono. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat: Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Wrihatnolo, Randy dan Riant Nugroho Dwidjowito. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal, Skripsi / Tesis

Putriana. 2012. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Riau: Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim. Vol. 15 No. 2.

Yopa, Kholidah Attina. 2017. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Budaya di Kebondalamkidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dinas

Badan Pusat Statistik : Kabupaten Kudus dalam Angka Tahun 2017

Badan Pusat Statistik : Kecamatan Jati dalam Angka Tahun 2017

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus

Profil Desa Loram Kulon Tahun 2018

Website

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>

<http://www.kuduskab.go.id/>